



**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Oleh

PONTI PRIMASTUTI AULIA NUGRAHENI

NIM 120810301130

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016



**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

PONTI PRIMASTUTI AULIA NUGRAHENI

NIM 120810301130

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

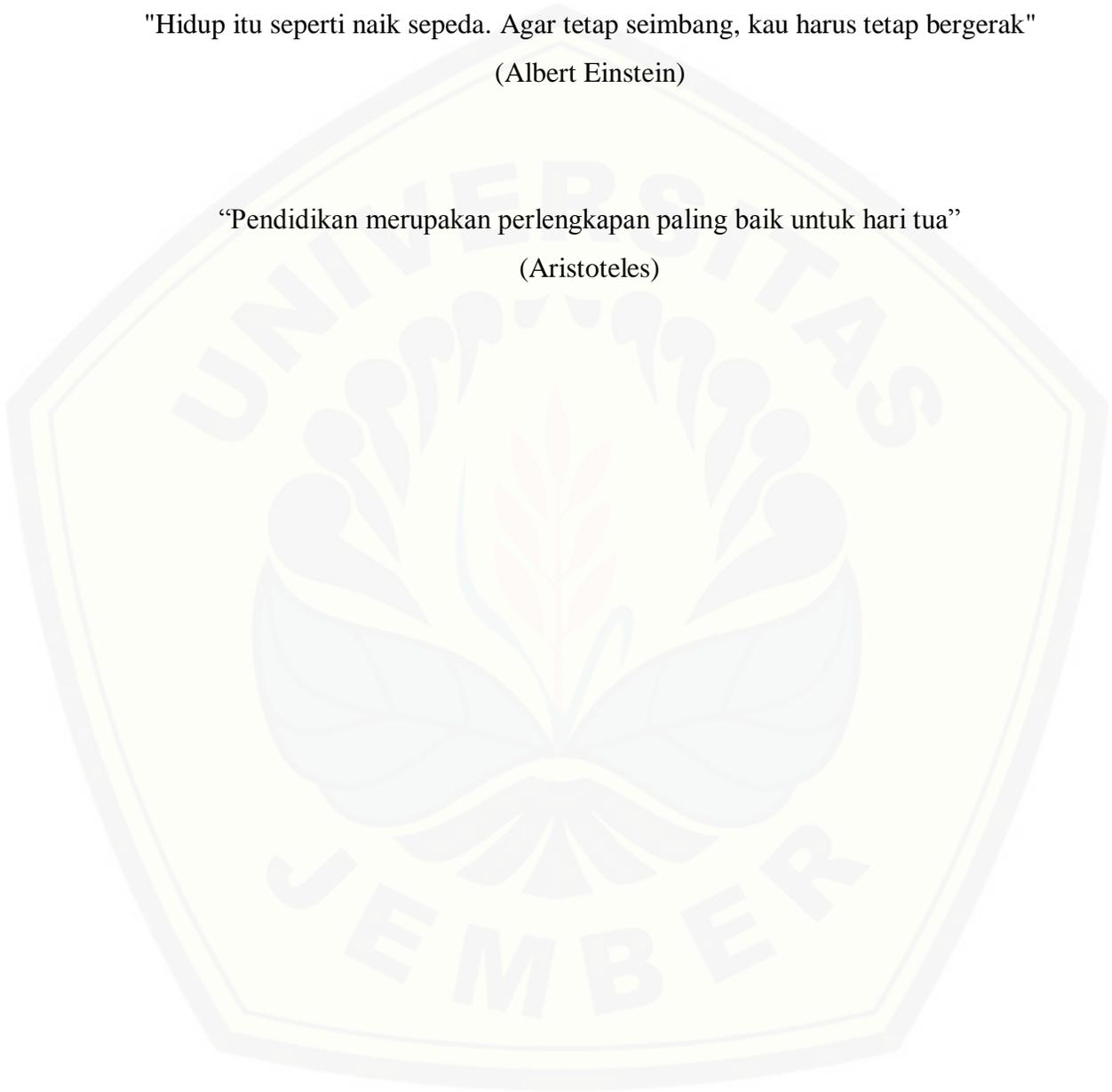
Puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Supriyadi dan Sudarsih, yang tak hentinya mendoakan, mendukung dan memotivasi sampai saat ini;
2. Kakakku tersayang, Savitri Aulia Wuri Handayani, yang terus menyemangati, mendoakan, dan membantu segala hal;
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi dan mendoakan sampai saat ini;
4. Guru dan dosen pembimbing yang tak pernah lelah membantu, membimbing, dan membagi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat;
5. Seluruh teman terbaikku, Ivan Daud Punu, Nazilla Ade, Jerry Eka, Octarisa, Deandra, Hudalila, dan lainnya yang tidak bias disebutkan satu persatu, atas segala bantuan, doa, dan motivasinya;
6. Seluruh teman Akuntansi angkatan 2012, kakak angkatan, dan lainnya yang tidak bias disebutkan satu persatu, atas segala doa, dukungan, dan semangatnya;
7. Almamater kebanggaan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

"Hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus tetap bergerak"
(Albert Einstein)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”
(Aristoteles)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ponti Primastuti Aulia Nugraheni

NIM : 120810301130

Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBER)

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan termasuk karya jiplakan, kecuali terdapat kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Februari 2016

Yang menyatakan,

Ponti Primastuti Aulia Nugraheni

NIM 120810301130

SKRIPSI

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER)**

Oleh

PONTI PRIMASTUTI AULIA NUGRAHANI

NIM 120810301130

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Siti Maria Wardayanti M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sudarno M.Si, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN DAN DESENTRALISASI
KINERJA MANAJERIALSATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah KabupatenJember)

Nama Mahasiswa : Ponti Primastuti Aulia Nugraheni
N I M : 120810301130
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 02 Februari 2016

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Siti Maria Wardayati M.Si, Ak.

NIP. 196608051992012001

Drs. Sudarno M.Si, Ak

NIP. 196012251989021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak.

NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ponti Primastuti Aulia Nugraheni

NIM : 120810301130

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

29 Februari 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Djoko Supatmoko M.M, Ak (.....)
NIP. 195502271984031001

Sekretaris : Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 198207232005011002

Anggota : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak (.....)
NIP. 195911101989021001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

Ponti Primastuti Aulia Nugraheni

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh akuntabilitas public terhadap kinerja Manajerial; untuk mengetahui dan menguji pengaruh terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember; untuk mengetahui dan menguji pengaruh desentralisasi terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *explanatory*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember yang terdiri dari 15 Kepala Dinas, 7 Kepala Badan dan 3 Kepala Kantor. Jumlah populasi sebesar 726 pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Variabel dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu variabel bebas atau *independen* (X) yang terdiri variabel akuntabilitas publik (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan desentralisasi (X3), variabel terikat atau *dependent* (Y) yaitu kinerja manajerial. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan hasil kesimpulan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember. Desentralisasi terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.

Kata kunci : akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan kinerja manajerial

Ponti Primastuti Aulia Nugraheni

Accounting Departement, Ekonomi Faculty, Jember University

ABSTRACT

The research objective is to investigate and examine the effect of public accountability to the managerial performance; to know and test the effect on the performance of the managerial SKPD in Jember; to know and test the effect of decentralization on the managerial performance of the SKPD in Jember. Research type used is explanatory research. The population used in this study were all employees of the regional work units Jember consisting of 15 Head of Department, 7 Head of the Agency Head Office 3. Total population of 726 employees of the Regional Government of Jember. The variables are grouped into two groups: free or independent variable (X) comprising public accountability variable (X1), budget goal clarity (X2) and decentralized (X3), bound or dependent variable (Y) that is managerial performance. Based on the analysis of data showed that the conclusions of public accountability significant effect on managerial performance SKPD in Jember. Budget goal clarity significantly influence the managerial performance of the SKPD in Jember. Decentralization on the managerial performance of the SKPD in Jember.

Keywords: *public accountability, budget goal clarity, decentralization and managerial performance*

RINGKASAN

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember); Ponti Primastuti Aulia Nugraheni, 120810301130; 2016: 72 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Akuntabilitas tidak terlepas dari permasalahan kinerja, karena di dalam organisasi terdapat banyak aktivitas, yang di selenggarakan oleh petugas berbagai jenis profesi sehingga dapat mengakibatkan rendahnya kinerja diantaranya lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan proses perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan keterlambatan didalam pengesahan Perda APBD, dari keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam meningkatkan kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti karena akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas tingkat kinerja dapat dicapai, akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Dengan desentralisasi akan

membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajerial dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan kebebasan dalam bertindak.

Desentralisasi akan meningkatkan independensi manajerial dalam berfikir dan bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi sehingga mendorong kinerja yang lebih baik

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh akuntabilitas public terhadap kinerja Manajerial; untuk mengetahui dan menguji pengaruh terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember; untuk mengetahui dan menguji pengaruh desentralisasi terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *explanatory*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember yang terdiri dari 15 Kepala Dinas, 7 Kepala Badan dan 3 Kepala Kantor. Jumlah populasi sebesar 726 pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Variabel dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu variabel bebas atau *independen* (X) yang terdiri variabel akuntabilitas publik (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan desentralisasi (X3), variabel terikat atau *dependent* (Y) yaitu kinerja manajerial.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan hasil kesimpulan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember. Desentralisasi terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Makadari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

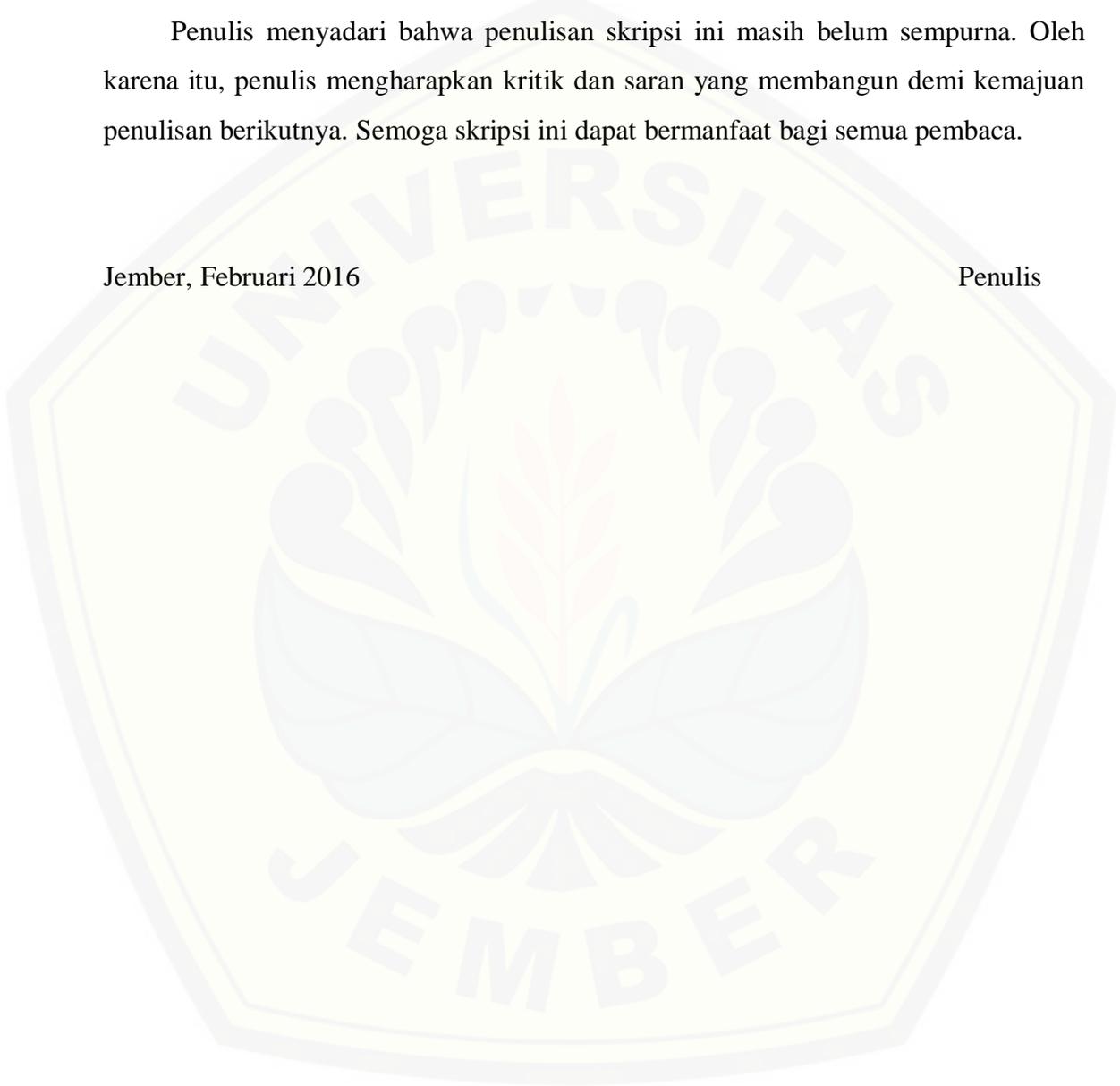
1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Dr. Siti Maria Wardayanti M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Sudarno M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan sabar dan tulus memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun;
6. Seluruh Pegawai Satun Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember yang turut serta dalam membantu menyiapkan data dan bersedia menjadi nara sumber dalam proses pembuatan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak atau Ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat;
8. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
9. Orang tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan;
10. Guru-guru di kehidupan penulis yang sangat berjasa;

11. Semua sahabat, teman seperjuangan di kampus dan organisasi, serta kakak tingkat atas bantuan dan semangatnya;
12. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penulisan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Jember, Februari 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	Error!
Bookmark not defined.	
ABSTRACT.....	Error!
Bookmark not defined.	
RINGKASAN.....	x
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xivv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB 1 PENDAHULUAN	
.....	Erro
r! Bookmark not defined.	

1.1 Latar Belakang Masalah	Err
or! Bookmark not defined.	
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Akuntansi Positif	9
2.1.2 Teori Desentralisasi Fiskal	10
2.1.3 Akuntabilitas Publik	12
2.1.4 Kejelasan Sasaran Anggaran	
Error! Bookmark not defined.	
2.1.5 Desentralisasi	16
2.1.6 Kinerja Manajerial	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Konseptual	21
2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian	22
2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial	22
2.4.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial	23
2.4.3 Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial	24

BAB 3 METODELOGI PENELITIAN

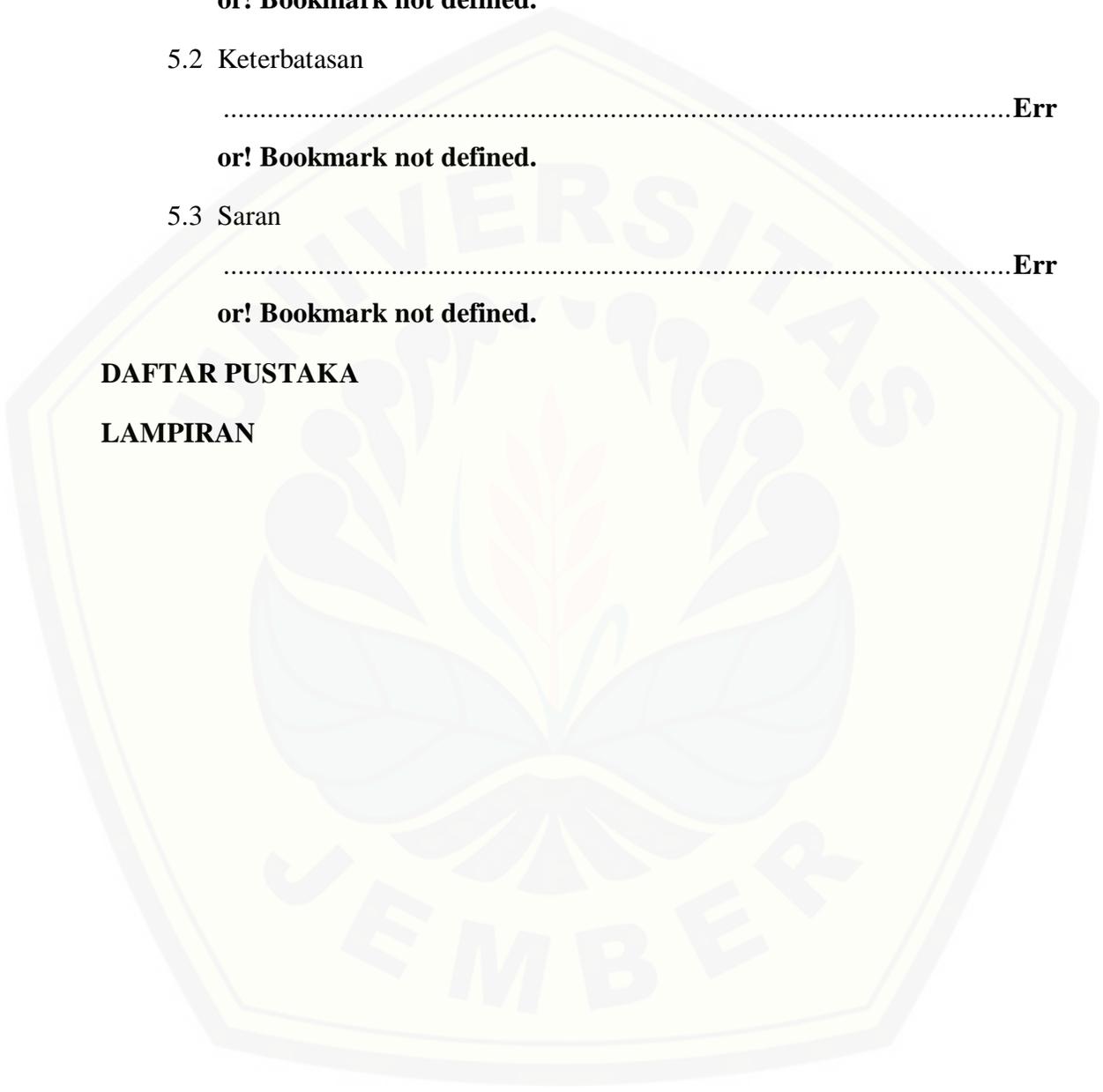
.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
3.1 Rancangan	penelitian Err
or! Bookmark not defined.	
3.2 Metode	Pengumpulan Data Err
or! Bookmark not defined.	
3.3 Jenis	dan Sumber Data Err
or! Bookmark not defined.	
3.4 Populasi	dan Sampel Penelitian Err
or! Bookmark not defined.	
3.4.1 Populasi Penelitian.....	26
3.4.2 Sampel Penelitian.....	26
3.5 Identifikasi	Variabel Err
or! Bookmark not defined.	
3.6 Definisi	Operasional Variabel Err
or! Bookmark not defined.	
3.7 Metode Analisis Data.....	30
3.7.1 Uji Instrument Data.....	30

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	32
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.7.4 Pengujian Hipotesis.....	35
3.7.5 Koefisien Determinasi Berganda (R^2).....	36
3.7.6 Uji T.....	36
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah.....	37
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember	38
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden.....	40
4.2.3 Hasil Uji Instrumen Data.....	43
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	44
4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
4.2.6 Koefisien Determinasi Berganda.....	49
4.3 Pembahasan	49
4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial.....	49
4.3.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.....	
..... Error! Bookmark not defined.	
4.3.3 Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	52

5.1 Kesimpulan	Err
.....	Err
or! Bookmark not defined.	
5.2 Keterbatasan	Err
.....	Err
or! Bookmark not defined.	
5.3 Saran	Err
.....	Err
or! Bookmark not defined.	

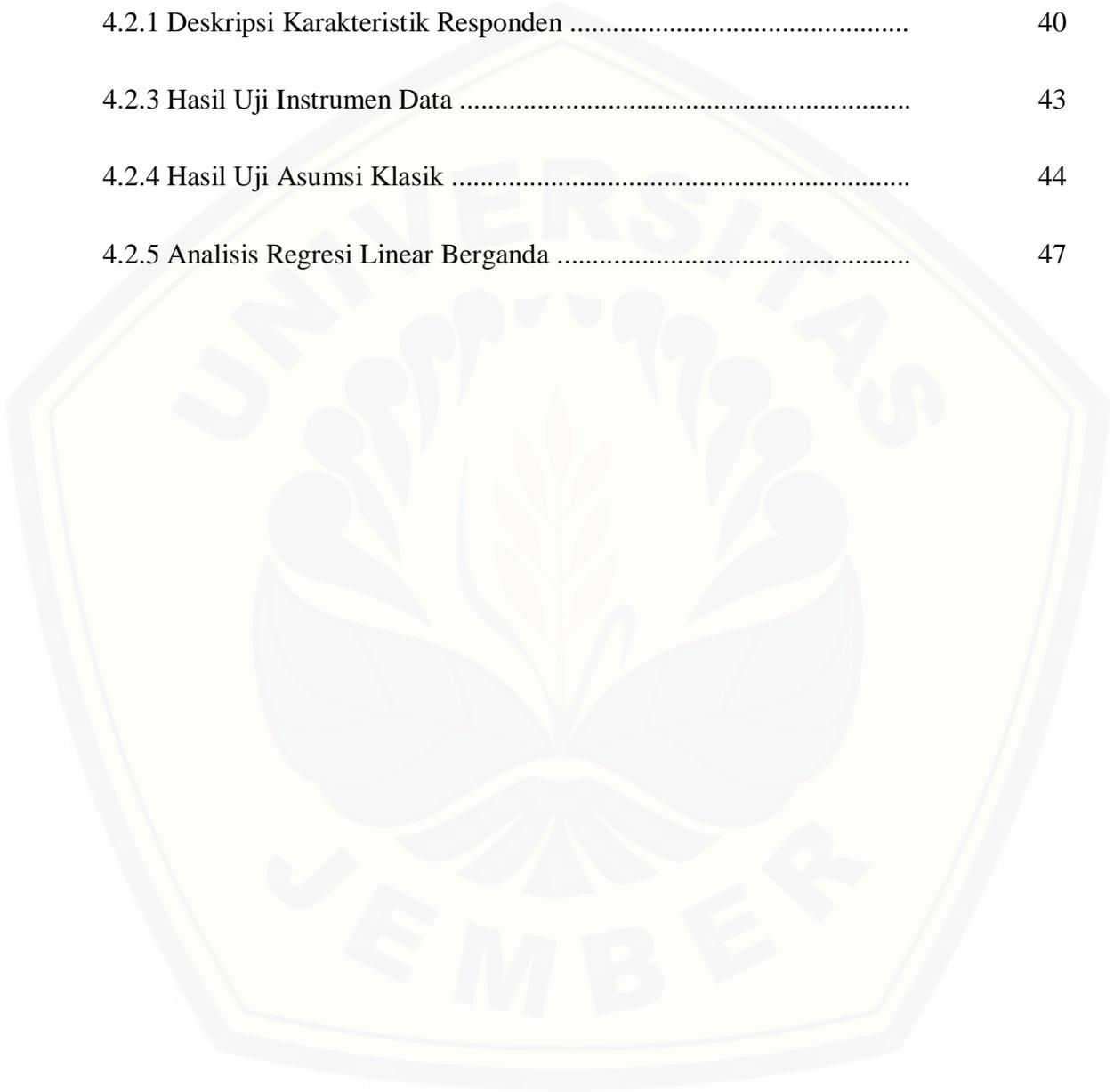
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



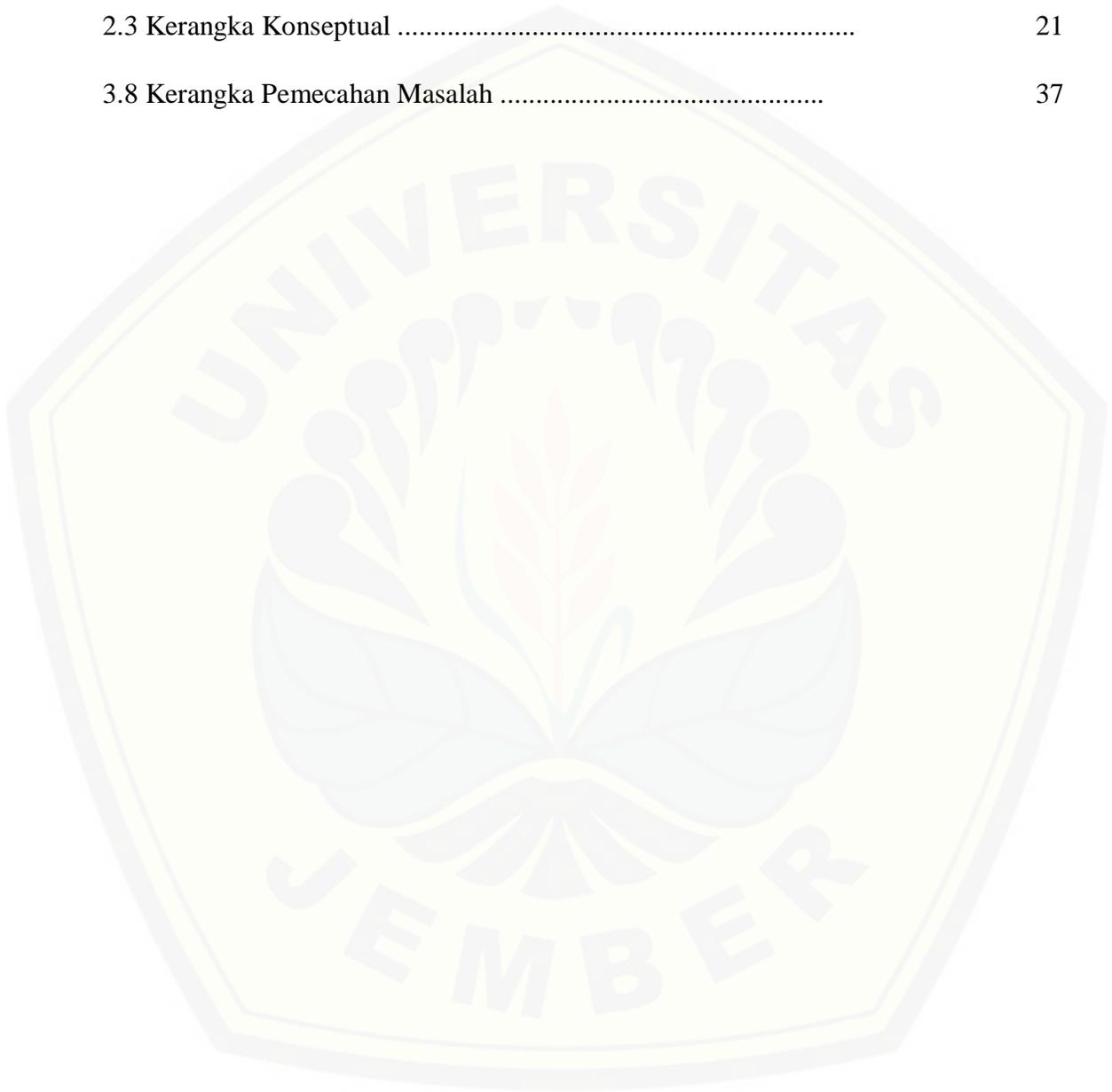
DAFTAR TABEL

	Halaman
4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden	40
4.2.3 Hasil Uji Instrumen Data	43
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	44
4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda	47



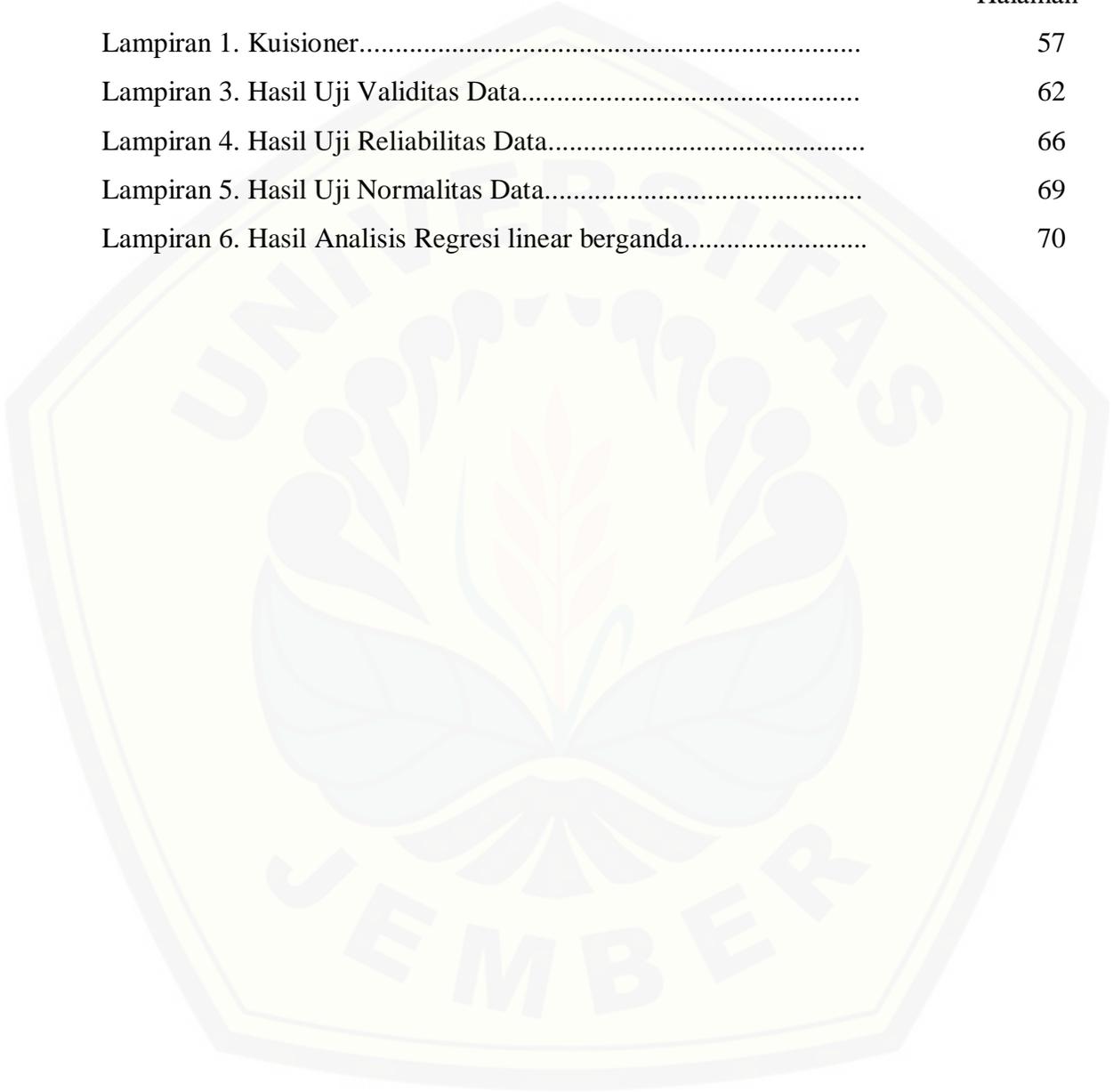
DAFTAR GAMBAR

	halaman
2.3 Kerangka Konseptual	21
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	37



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuisisioner.....	57
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Data.....	62
Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas Data.....	66
Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas Data.....	69
Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi linear berganda.....	70



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan *good governance* (Mardiasmo, 2009:20).

Reformasi pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Adanya ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adanya peraturan tentang penerapan akuntansi pemerintahan maka dalam melapirkan aktivitas keuangan pemerintahan juga dipengaruhi oleh kinerja managerial pemerintah terutama yang berhubungan dengan keuangan daerah. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan. Sebagai organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Mahsun (2015 : 141) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintahan. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, antara lain akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Demikian halnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember terkait dengan masalah akuntabilitas tidak terlepas dari permasalahan kinerja, karena di dalam organisasi terdapat banyak aktivitas, yang di selenggarakan oleh petugas berbagai jenis profesi sehingga dapat mengakibatkan rendahnya kinerja diantaranya lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan proses perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan keterlambatan didalam pengesahan Perda APBD, dari keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam meningkatkan kinerja manajerial.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawab yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Putra, 2012 : 2). Adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah harus berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada ditindaklanjuti secara praktis kedalam program operasional yang berorientasi kepada *economic*

quality dan *quantity* artinya pengelolaan secara efektif dan efisien, melayani segala lapisan masyarakat dan berkualitas, karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Kualitas proses pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan proses penganggaran. Kenis dalam Putra (2014 : 2) mengatakan salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti karena akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas tingkat kinerja dapat dicapai, akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidak jelasan sasaran anggaran menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

Kondisi administratif yang semakin kompleks, membuat tugas dan tanggung jawab memerlukan desentralisasi, sehingga pendelegasian wewenang akan membantu meringankan beban manajemen yang lebih tinggi karena desentralisasi menunjukkan otoritas serta tanggung jawab untuk pengambilan keputusan pada para manajer pada semua tingkat dari suatu hierarki organisasi. Menurut Dwiyanto (2014 : 46), desentralisasi yaitu perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Menurut Mardiasmo (2009 : 24) desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih luas tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusannya dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Dengan demikian desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajerial dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan independensi manejerial dalam berfikir dan bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi sehingga mendorong kinerja yang lebih baik (Gede, 2014:3).

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan anggaran Pemkab Jember yang tidak terserap optimal. Bahkan, hingga memasuki triwulan akhir ini, ternyata penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Jember pada tahun 2014 ini masih sekitar 61%. Hal itu juga disebabkan oleh kinerja manajerial yang masih belum bisa sepenuhnya mengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, kinerja manajerial perlu perhatian supaya penggunaan anggaran terserap optimal karena alokasi yang masih perlu penanganan lebih terarah (Arifiyanto, 2015).

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran), diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Jember harus menerapkan SAP pada masing-masing SKPD yang ada.

Penelitian yang terkait yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya Gede (2014) yang menganalisis pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. secara kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, Struktur desentralisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, dan pengawasan internal memoderasi partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial.

Putra (2012) menganalisis akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Hasilnya menunjukkan Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial. Anjarwati (2012) menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasilnya menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Putra (2012) yang perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu desentralisasi, obyek penelitian. Obyek penelitian di SKPD Kabupaten Jember. Penelitian ini mengambil replika dari Putra Putra (2012) karena penelitian ini juga mengangkat topik tentang kinerja instansi

pemerintah. Selain itu, replikais disebabkan adanya hasil dari penelitian Putra (2012) sama-sama mengangkat tentang kinerja dan desentralisasi pegawai Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas serta penelitian- penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Studi Empiris pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Jember).

1.2.Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja Manajerial ?
- b. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Manajerial ?
- c. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja Manajerial ?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.
- b. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.
- c. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh desentralisasi terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan wacana dan referensi tentang akuntansi sektor publik terutama di Fakultas Ekonomi Universitas Jember berkenaan dengan adanya pengaruh akuntabilitas dan kejelasan sasaran anggaran serta struktur desantralisasi.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta menjadi media pembanding untuk membandingkan antara teori dan fakta.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif (TAP) merupakan suatu bangun teori akuntansi yang mempunyai sasaran untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Menjelaskan berarti memberikan alasan-alasan pada praktik akuntansi yang diamati dan memprediksi praktik akuntansi memiliki arti bahwa teori memprediksi fenomena yang belum teramati (Watts and Zimmerman, 1986) dalam Astika (2010:41).

Perkembangan teori akuntansi positif tidak lepas dari perkembangan teori akuntansi normatif yang terjadi sebelumnya. Teori akuntansi berkembang sejak awal abad ke-20 dan dapat dikatakan diawali oleh tulisan Patton and Littleton (1940) dalam Astika (2010:48) yang berjudul *An Introduction to Corporate Accounting Standards*. Praktik akuntansi telah berkembang sejak masa sebelum Masehi dan terdokumentasi mulai awal abad 15 dengan diterbitkannya tulisan Luca Pacioli. Pada era tersebut praktik akuntansi sudah mengenal praktik jurnal berpasangan (*double entry*).

Sumbangan yang sangat berarti dalam teori akuntansi positif terjadi dengan diterbitkannya buku yang berjudul *Positive Accounting Theory* oleh Watts and Zimmerman (1986) dalam Astika (2010:49), yaitu TAP menempatkan asumsi, definisi, dan logika untuk mengorganisasi dan menganalisis fenomena empiris. Di samping itu, TAP juga menempatkan seperangkat hipotesis. Hipotesis merupakan prediksi yang dapat dihasilkan melalui pengamatan suatu fenomena. Teori ini membahas tiga hipotesis utama, yaitu sebagai berikut.

a. Hipotesis Program Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa para manajer perusahaan yang memiliki program bonus lebih cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan

laba periode mendatang ke periode berjalan. Hipotesis ini telah mendapat dukungan empiris dari Healy (1985) dan Holthousen *et al.* (1995) dalam Astika (2010:49).

b. Hipotesis Persyaratan Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan ke arah pelanggaran persyaratan utang yang didasarkan atas angka akuntansi maka manajer perusahaan lebih cenderung untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Sweeney (1994) dalam Astika (2010:49), menemukan bahwa tidak semua perusahaan yang melanggar syarat-syarat perjanjian melakukan kebijakan akuntansi meningkatkan laba. Temuan Sweeney membuktikan bahwa dalam menentukan kebijakan akuntansi, perusahaan-perusahaan menentukan pisah batas (*trade-off*) antara biaya dan manfaat dari perubahan kebijakan akuntansi.

c. Hipotesis Kos Politis (*Political Cost Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar kos politis yang dihadapi perusahaan, maka manajer cenderung untuk menangguhkan laba berjalan ke masa mendatang. Penelitian terhadap hipotesis ini dilakukan oleh Watts dan Zimmerman (1978) dan Jones (1991) dalam Astika (2010:50).

2.1.2 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan negara-negara sedang berkembang untuk menghindari ketidakefektifan dan ketidak-efisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992 : 384). Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

Bahl (1999 : 65) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Saragih, 2003 : 12). Oleh sebab itu, otonomi daerah membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memampukan kemampuan keuangan daerah di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum. Hal ini diwujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2009 : 28).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003 : 83). Bird dan Vaillancourt (2000 : 3) serta Manor (1999 : 60) mengatakan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Ebel (2000 : 42) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal terkait dengan masalah:

- a. Pembagian peran dan tanggung jawab antarjenjang pemerintahan;
- b. Transfer antarjenjang pemerintahan;
- c. Penguatan sistem pendapatan daerah atau perumusan sistem pelayanan publik di daerah;

- d. Swastanisasi perusahaan milik pemerintah (terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah); dan
- e. Penyediaan jaring pengaman sosial.

2.1.3 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2015 : 169).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009 : 20). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu :

- a. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan perintah pusat kepada MPR.
- b. Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban pada masyarakat secara luas

Akuntansi sektor publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi Ellwood dalam Mardiasmo (2009 : 21) menjelaskan

terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik yaitu :

a. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

b. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

c. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan – pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

d. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2.1.4 Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran adalah rencana kerja mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, selain itu anggaran juga dapat dinyatakan dalam satuan unit barang (Nafarin, 2014 : 12). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009 : 61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Noerdiawan (2010 : 65) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Anthony dan Govindarajan (2011 : 91) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.

Fungsi anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009 : 63) yaitu :

- a. anggaran sebagai alat perencanaan,
- b. anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan hasil apa yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Sedangkan manfaat proses penganggaran menurut Garisson (2014 : 382) sebagai berikut :

- a. Penyusunan anggaran merupakan cara manajer merumuskan upaya perencanaan mereka,
- b. Penyusunan anggaran menetapkan tujuan dan sasaran secara pasti yang berfungsi sebagai standar untuk menilai prestasi kerja dikemudian hari.

Anggaran daerah harus bisa harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan

sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis dalam Gede (2014 : 3) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Locke dalam Suhartono dan Solichin (2006 : 6) mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan sehingga akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik, karena ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, hal ini akan menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti.

Menurut Locke dalam Putra (2012 :6) agar pengukuran sasaran anggaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan yaitu:

- a. Tujuan : membuat secara terperinci tujuan umum tugas yang harus dikerjakan
- b. Kinerja : menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur
- c. Standar : menetapkan standar atau target yang ingin dicapai
- d. Jangka waktu : menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan
- e. Sasaran Prioritas : menetapkan sasaran yang prioritas
- f. Tingkat kesulitan : menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya
- g. Koordinasi : menetapkan kebutuhan koordinasi

Keterlibatan individu dalam menyusun anggaran akan membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapai dengan menggunakan sumber yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Realisasi anggaran dalam kaitannya dengan kinerja manajerial berdasarkan teori akuntansi positif dimana Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi.

2.1.5 Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan wewenang pada tingkat pemerintah dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan dan terbentuknya dewan yang dipilih. Menurut Krismiaji (2011 : 286) Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Menurut Dwiyanto (2014 : 46) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintahan, manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Desentralisasi pada saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Penerimaan desentralisasi sebagai azas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografi, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajuan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah (Prasojo dalam Agusti, 2012 : 4)

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua variabel penting, yaitu peningkatan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Menurut Galbraith dalam Nor (2007 : 5) struktur organisasi yang terdesentralisasi diperlukan pada kondisi administratif, tugas dan tanggungjawab yang semakin kompleks, yang selanjutnya memerlukan pendistribusian otoritas manajemen yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi diperlukan karena dalam struktur yang terdesentralisasi para manajer atau bawahan diberi wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Sehingga struktur organisasi yang terdesentralisasi mampu untuk meningkatkan kinerja manajerial dalam berfikir dan bertindak di satu tim tanpa mengorbankan kepentingan organisasi karena manajer akan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Menurut Hadi dalam Annisa (2013 : 5) desentralisasi sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang mempunyai prinsip dan tujuan antara lain :

- a. Mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
- b. meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan antar daerah,
- c. Meningkatkan efisiensi sumber daya nasional,
- d. Tata kelola transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu efisien.

Desentralisasi merupakan praktek pendelegasian wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih atas kepada jenjang manajer yang lebih bawah. Organisasi yang terdesentralisasi adalah sebuah organisasi yang memiliki kebijakan bahwa keputusan tidak dipusatkan manajemen pusat, namun pembuat keputusan disebar atau dilakukan oleh manajer pada berbagai jenjang sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditentukan (Krismiaji 2011 : 286).

Menurut Krismiaji (2011 : 286) desentralisasi atau pendelegasian wewenang kepada manajer yang lebih rendah memiliki keuntungan sebagai berikut :

- a. Akses informasi local

Manajer divisi memiliki akses divisi lokal atau informasi tentang divisi yang bersangkutan secara lebih baik dibanding manajemen pusat.

b. Keterbatasan kognitif

Meskipun manajemen pusat dapat informasi lokal, namun manajemen pusat tetap saja menghadapi persoalan yang lebih besar dan kompleks, serta menghasilkan banyak produk, tidak seorangpun mampu menguasai seluruh persoalan yang terjadi.

c. Respon lebih tepat waktu

Dengan menyerahkan wewenang untuk membuat keputusan kepada manajer divisi, maka respon terhadap persoalan muncul lebih tepat waktu.

d. Fokus manajemen pusat

Manajemen pusat dapat memfokuskan dan berkonsentrasi pada persoalan-persoalan pan pembuatan keputusan stratejik yaitu persoalan dan keputusan jangka panjang.

e. Pelatihan dan Penilaian

Desentralisasi juga mampu untuk menilai kinerja para manajer divisi dan memiliki kemampuan membuat keputusan yang baik dan tepat dapat terpilih untuk dipromosikan.

f. Motivasi

Dengan motivasi yang tinggi para manajer akan lebih proaktif mengambil inisiatif dan lebih kreatif.

g. Meningkatkan kompetensi

Cara terbaik untuk memperbaiki kinerja divisi adalah melakukan pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja ini hanya dapat dilakukan jika masing-masing divisi diberi kewenangan unttuk membuat keputusan sendiri dan menerapkan keputusan tersebut.

Menurut Bangun dalam Annisa (2013 : 7) Agar pengukuran desentralisasi semakin baik ada beberapa indikator dalam desentralisasi yang mengacu ke Permendagri 13 tahun 2006 terdiri dari :

- a. Pemberian wewenang dan menentukan jmlah anggaran
- b. Pemberian wewenang dalam menentukan program kegiatan
- c. Penunjukan kewenangan dalam menentukan keterlibatan pegawai
- d. Peningkatan wewenang dalam menentukan skala prioritas
- e. Pemberian wewenang dalam menentukan penambahan dan mutasi pegawai.

Pengembangan variabel desentralisasi didasarkan pada teori desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan kebijakan fiskal, khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi antara lain yang berkaitan dengan fiscal sustainability, dan tetap memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan koreksi atas ketimpangan antar daerah, sehingga taxing power yang diberikan kepada daerah tetap tidak terlalu besar. Kendatipun perdebatan mengenai manfaat dari desentralisasi fiskal di Indo-nesia masih terus berlangsung, kini timbul harapan besar bahwa desentralisasi fiskal akan memberi manfaat seperti perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengentasan orang miskin, manajemen ekonomi makro yang lebih baik, serta sistem tata pemerintahan (*governance*) yang lebih baik.

2.1.6 Kinerja Manajerial

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkatan keberhasilan individu maupun kelompok individu. Menurut Mahsun (2015 : 141) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pada sektor pemerintah, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Menurut Mahoney *et.al* dalam Putra (2012 : 4), kinerja manajerial adalah kinerja para

individu anggota organisasi dalam kegiatan manjerial, yang diukur dengan menggunakan indikator :

- a. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerjasehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencacatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
- c. Koordinasi, menelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dilaksanakan.
- d. Evaluasi adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
- e. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menangani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.
- f. Pemilihan staff, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
- g. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontral untuk barang dan jasa.
- h. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnsi dan konsultasi dengan kantor- kantor lain.

Menurut Septi dalam Putra (2012 : 4) kinerja pemerintah daerah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dmenilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2002). Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menatapakan *reword and punishment system*.

2.2 Penelitian Terdahulu

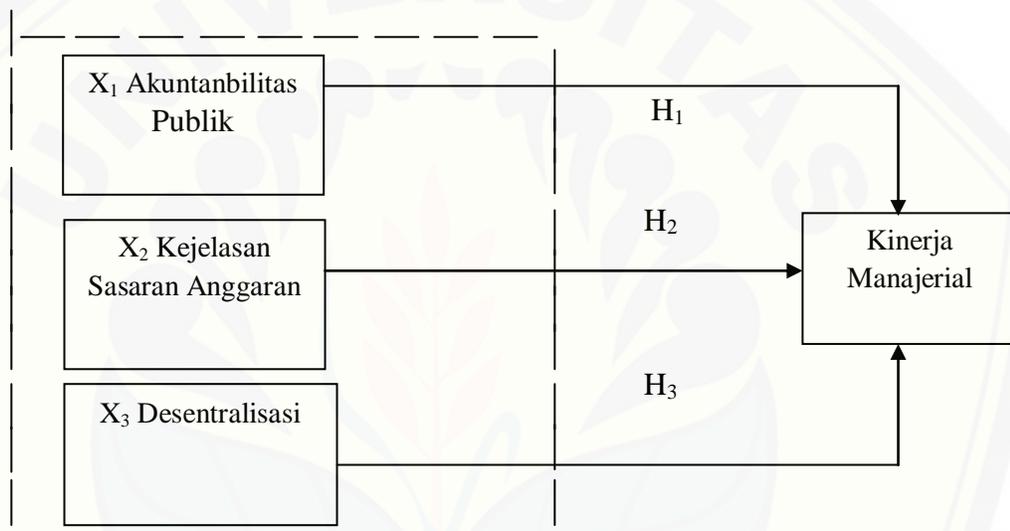
Penelitian yang terkait telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, Putra (2012) yang menganalisis pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, serta kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Gede (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desantralisasi terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dan struktur desantralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Annisa (2013) meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori diatas, maka dapat dikemukakan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai acuan dan sekaligus pola pikir yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan perumusan hipotesis. Kerangka konseptual yang disajikan meliputi variabel akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi serta kinerja manajerial. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan :

H₁, H₂, H₃ = berpengaruh parsial

2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, manajer

membutuhkan laporan kinerja dari staffnya untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik (Deddi, 2010 : 69)

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar bear dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran (Mardiasmo, 2009 : 20). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mngetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh pemerintah. Kinerja pemerintah darah dilihat dalam laporan kinerja, akan memperhatikan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Deddi (2010 : 69) pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah, daerah diperlukan adanya akuntabilitas kinerja. Hal ini ditegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kenerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

H1 : Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial

2.4.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

Menurut Kenis dalam Gede (2014 : 3) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut.

Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah dinyatakan secara jelas, spesifik dan mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab.

Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam strategi daerah dan program pembangunan daerah. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasinya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyusun target target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin di capai dalam penelitian terdahulu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dalam penelitian sebelumnya banyak yang menunjukkan pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial. Hal ini juga sesuai dengan teori akuntansi positif yang dipakai oleh pengguna informais anggaran. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial

2.4.3 Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial

Desentralisasi adalah proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan. Organisasi desentralisasi secara umum ditunjukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam sentralisasi yang baik, sebagian keputusan diambil pada tingkat herarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.

Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada SKPD sehingga SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih informasi yang lebih banyak besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang strukturnya lebih

terdesentralisasi mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan seperti yang dimaksudkan dalam teori differensiasi fiskal.

Penelitian dari Annisa (2013) tentang kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja.

H3 : Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Menurut Singarimbun dan Effendi (2010 : 256), rancangan penelitian merupakan bagian dari keseluruhan metode penelitian. Menyusun rancangan sebuah penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil sebelum penelitian dilakukan, agar data yang diperlukan dapat diperoleh dan analisisnya bersifat objektif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *explanatory* atau penelitian penjelasan, yaitu suatu jenis penelitian yang menyoroti hubungan variabel penelitian ini dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.2 Metode Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui angket, yaitu menyebarkan kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Kuesioner ini berisi sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan kinerja manajerial. Angket yang sudah diisi oleh responden dilakukan penyelesaian angket tersebut agar angket yang tidak lengkap tidak diikutkan dalam analisis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian adalah data subyek. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer . Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pernyataan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden (Indriantoro dan Supomo, 2009 : 115) .

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian. Populasi terdiri atas sekumpulan obyek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui (Arikunto, 2010: 173). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember yang terdiri dari 15 Kepala Dinas, 7 Kepala Badan dan 3 Kepala Kantor. Jumlah populasi sebesar 726 pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

3.4.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah elemen yang digunakan dalam penelitian yang merupakan bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria didalamnya yaitu para pimpinan pada berbagai level organisasi merupakan subyek yang tepat untuk memberikan informasi berdasarkan pertimbangan, pengetahuan, pengalaman yang mereka miliki. Adapun kriteria pengambilan sampel didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Pimpinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember yang terdiri dari 15 Kepala Dinas, 7 Kepala Badan dan 3 Kepala Kantor. Alasan sampel adalah dinas, kepala badan, kepala kantor dan kepala bagian perencanaan karena kepala dinas, kepala badan, kepala kantor dan kepala bagian perencanaan sebagai penanggung jawab kegiatan/program yang meliputi perencanaan sampai pengendalian sumber daya yang ada didalamnya dan sebagai pemimpin dalam menentukan arah yang mencerminkan kinerja instansi yang dipimpinnya. Sedangkan Kepala bagian perencanaan sebagai pengelola bagian anggaran dan aset beserta jajaran anggota/pegawainya serta sebagai pelaksana pertanggungjawaban pembuatan laporan keuangan yang mencerminkan laporan kinerja instansi.

- b. Penelitian ini tidak dilakukan pada kantor Pemerintah karena dalam penyelenggaraan anggaran bersumber pada laporan SKPD-SKPD baru diserahkan pada kantor Badan pengelolaan keuangan. Hal itu berarti SKPD merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan aktivitas pemerintahan terutama berhubungan dengan anggaran dan kinerja.

Berdasarkan kriteria tersebut maka kinerja managerial hanya difokuskan kepada kinerja pimpinan dalam SKPD dan kepala bagian perencanaan anggaran sehingga jumlah sampel 50 orang.

3.5 Identifikasi Variabel

Variabel dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu variabel bebas atau *independen* (X) yang terdiri variabel akuntabilitas publik (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan desentralisasi (X3), variabel terikat atau *dependent* (Y) yaitu kinerja manajerial.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas (*independent*) akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan satu variabel terikat (*dependent*) yaitu kinerja manajerial yang diukur dengan menggunakan skala likert 5 (lima) point, yaitu skala 5 sangat setuju, skala 4 setuju, skala 3 cukup setuju, skala 2 tidak setuju dan skala 1 sangat tidak setuju. Secara operasional variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.:

- a. Akuntabilitas publik (X1) adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut dengan indikator yang diukur (Mardiasmo, 2009 : 21) :
1. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-

kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
 3. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan - pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber- sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal nya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
 4. Akuntabilitas Hukum dan akuntabilitas kejujuran. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana Publik.
- b. Kejelasan Sasaran anggaran (X2) merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Indikator yang diukur diadopsi dari Locke dalam Putra (2012 : 6) :
1. Tujuan : membuat secara terperinci tujuan umum tugas yang harus dikerjakan.
 2. Kinerja : menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.

3. Standar : menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
 4. Jangka waktu : menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
 5. Sasaran Prioritas : menetapkan sasaran yang prioritas.
 6. Tingkat kesulitan : menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
 7. Koordinasi : menetapkan kebutuhan koordinasi
- c. Desentralisasi (X3) adalah proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan. Indikator yang diukur diadopsi dari Bangun dalam Annisa (2014 : 7) :
1. Pemberian wewenang dan menentukan jumlah anggaran.
 2. Pemberian wewenang dalam menentukan program kegiatan.
 3. Penunjukan kewenangan dalam menentukan keterlibatan pegawai.
 4. Peningkatan wewenang dalam menentukan skala prioritas.
 5. Pemberian wewenang dalam menentukan penambahan dan mutasi pegawai.
- d. Variabel Dependen. Kinerja manajerial (Y) adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator diadopsi dari Mahoney et.al dalam Putra (2012 : 4):
1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
 2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencacatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

3. Koordinasi yaitu menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dilaksanakan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
5. Pengawasan yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menangani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.
6. Pemilihan staff yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
7. Negoisasi yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontral untuk barang dan jasa.
8. Perwakilan yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnsi dan konsultasi dengan kantor- kantor lain.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin di ukur (Sugiyono, 2010:56). Uji validitas sebuah data bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Uji validitas adalah esens kebenaran penelitian. Sebuah *instrument* dikatakan valid apabila mampu, mengukur apa yang hendak diukur serta dapat mengungkapkan data

dan variabel yang akan diteliti secara tepat. Kriteria validitas yang dilakukan dengan analisis faktor (*Confirmatory Factor Analysis*) adalah valid jika nilai KMO > 0,5 dan *Barlett's Test* dengan signifikansi < 0,05 (Ghazali, 2006 : 47).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Sebuah instrumen harus reliabel, dalam arti bahwa instrument tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya (Arikunto, 2010 : 169).

Uji reliabilitas dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach's*, suatu instrument dikatakan reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,06 (Ghazali, 2006 : 42), dengan rumus:

$$\alpha = \frac{(K)\text{Cov}/\text{Var}}{1 + (K - 1)\text{Cov}/\text{Var}}$$

Dimana :

α = alpha

K = jumlah butir dalam skala

Cov = rerata kovarians di antara butir

Var = rerata varians dari butir

Setelah menilai alpha, selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabilitas. Instrumen yang dipakai dalam variabel diketahui handal (*reliabel*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* >0,60 (Ghazali, 2006 : 42).

c. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan

bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004 : 212). Kriteria pengujian dengan melihat besarnya *kolmogorov-smirnov test* adalah sebagai berikut :

1. Angka Signifikansi (Sig.) > 0,05, maka data berdistribusi normal
2. Angka Signifikansi (Sig.) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas publik kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial digunakan fungsi regresi linier berganda. Dengan rumus (Supranto, 2008 : 180)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Dimana :

Y	= kinerja manajerial
X ₁	= akuntabilitas publik
X ₂	= kejelasan sasaran anggaran
X ₃	= desentralisasi
a	= konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃	= koefisien regresi X ₁ , X ₂ , X ₃ terhadap variabel Y
e _i	= variabel pengganggu

Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda ini maka peneliti akan mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh variabel akuntabilitas publik, kejelasan sasaran dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Analisis ini diolah dengan bantuan program SPSS (*Statistic Program for Scocial Science*) 19.0 for Windows.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Berbeda dengan alat analisis lainnya, regresi berganda memerlukan uji persyaratan yang sangat ketat. Uji persyaratan pada regresi berganda biasa disebut dengan istilah uji asumsi klasik. Dalam melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik parametrik, khususnya dalam penggunaan statistik regresi linear ganda diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan awal, untuk menggunakan regresi sebagai salah satu alat analisis yaitu, variabel penelitian harus diukur paling rendah dalam bentuk skala interval (Gunawan, 2005 : 95). Apabila variabel-variabel penelitian tersebut diukur dalam bentuk skala interval, maka telah memenuhi salah satu persyaratan awal untuk menggunakan statistik parametrik. Tentu saja timbul pertanyaan, mengapa data harus minimal berskala interval. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa dalam statistik parametrik penghitungan-penghitungan yang dilakukan tidak hanya sekedar menghitung berapa besarnya frekuensi, seringkali sesuatu terjadi dan yang sejenisnya, akan tetapi lebih dari itu, yaitu dilakukan juga penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data yang dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan dan juga dibagi hanyalah data yang minimal berskala interval. Data yang berskala ordinal bahkan berskala nominal tidak dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan dan juga dibagi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa statistik parametrik memerlukan data minimal berskala interval atau yang lebih tinggi lagi, yaitu data yang berskala rasio. Selain data harus berskala interval, beberapa persyaratan berikutnya yang juga harus dipenuhi antara lain berupa persyaratan untuk analisis regresi linear ganda, antara lain terdiri dari (a) tidak terjadi adanya heteroskedastisitas, (b) tidak terdapat saling hubungan antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya (uji multikolinearitas). Oleh karena itu, sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan untuk menggunakan regresi berganda (Gunawan, 2005 : 99).

a. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (Ghazali, 2006 : 92). Nilai *cutoff* untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana seluruh faktor pengganggu tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. Jika dalam regresi terdapat heteroskedastisitas maka penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil penaksiran akan menjadi kurang akurat. Mengukur gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan grafik *scatter plot*. Dimana data dianggap bebas dari heteroskedastisitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut (Santoso, 2004 : 37) :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi lain adalah bentuk nilai residual dari pengamatan yang bersifat bebas (tidak berkorelasi) dengan periode pengamatan-pengamatan lain.

Korelasi berkaitan dengan hubungan diantara nilai-nilai yang berurutan dari variabel yang sama. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka digunakan *Durbin Watson Test*. Menurut Santoso (2004 : 219) apabila *Durbin-Watson* statistik terletak pada -2 sampai dengan 2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Uji F atau pengujian serentak digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan (bersama-sama) koefisien regresi variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Langkah-langkah uji F adalah:

1. Merumuskan hipotesis

$H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$, dimana variabel-variabel bebas yang bersifat secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat

$H_a : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, dimana variabel-variabel bebas yang bersifat secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah $\alpha = 5\%$ pada *confidence interval* sebesar 95% dengan *degree of freedom (df)* adalah $(k-1)$ dan $(n-1)$ dimana k adalah banyaknya variabel regresor dan n merupakan banyaknya observasi.

3. Menurut Gujarati (dalam Sumarsono, 2004: 225) rumus uji F sebagai berikut:

$$F = \frac{r^2/(k-1)}{(1-r^2)/(n-K)}$$

Dimana : r^2 = koefisien determinasi

n = Jumlah data

K = Jumlah variabel bebas

$$F = \text{Hasil } F_{\text{hitung}}$$

Hipotesis nol diterima atau ditolak apabila

- d. $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} = H_0$ ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat
- e. $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}} = H_0$ diterima, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.7.5 Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Sumarsono (2004 : 226) mengatakan bahwa nilai koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Bila koefisien determinasi berganda (R^2) mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variasi variabel terikat.

3.7.6 Uji t

Menurut Sumarsono (2004 : 226) uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis nol dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan tingkat signifikan $\alpha = 5 \%$, apabila signifikansinya lebih kecil dari $\alpha = 5 \%$, maka H_0 bisa ditolak berarti secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. apabila signifikansinya lebih besar dari $\alpha = 5 \%$, maka H_0 bisa diterima berarti secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_i}{S_b}$$

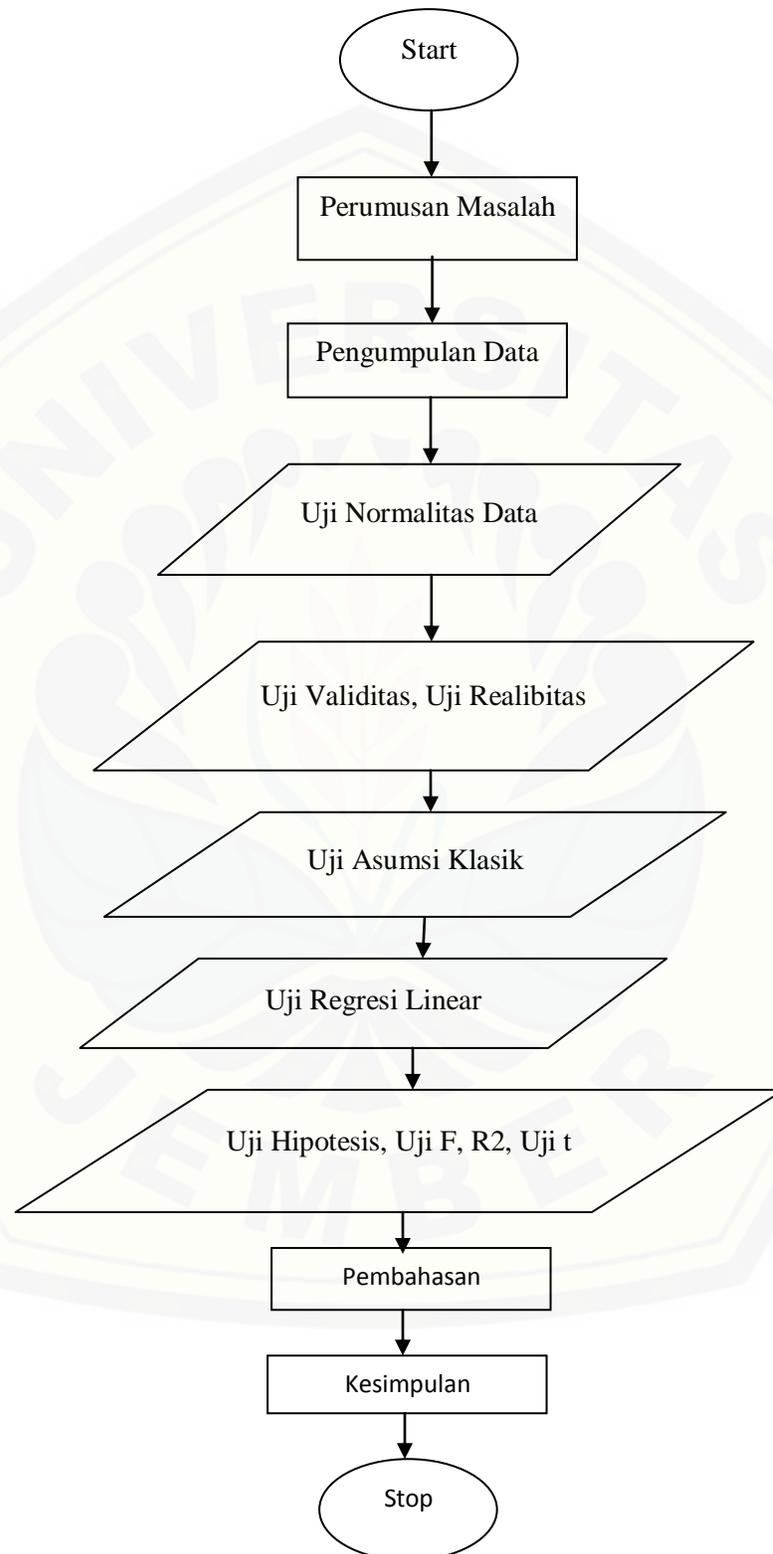
t = nilai t hitung

β_i = Koefisien regresi variabel bebas

S_b = Kesalahan standar koefisien regresi



3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan hasil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.
- b. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.
- c. Desentralisasi terhadap kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

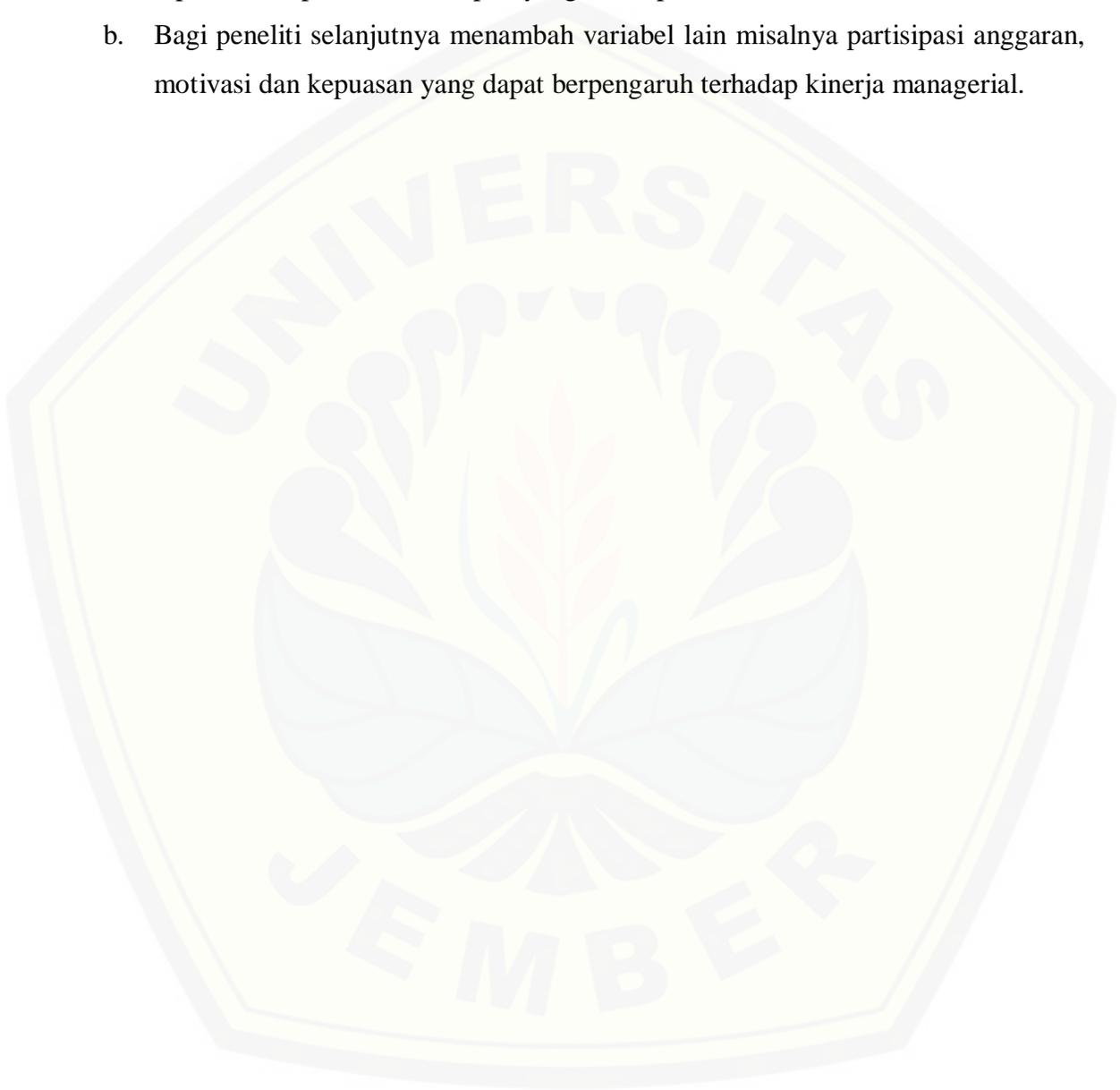
- a. Data penelitian ini dihasilkan dari penggunaan instrumen yang berdasarkan pada persepsi jawaban responden. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya.
- b. Penelitian ini juga hanya menggunakan dua variabel yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan variabel yang mungkin mempengaruhi kinerja manajerial. Hal ini terlihat dari *adjusted* R Square sehingga hal ini menunjukkan bahwa masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial.

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan pada kantor lain atau instansi lain saja sehingga ada perbandingan hasil penelitian.

- b. Penelitian selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode survei melalui kuisisioner juga dapat melakukan wawancara terhadap manajer sehingga dapat diperoleh responden dan respon yang diharapkan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya menambah variabel lain misalnya partisipasi anggaran, motivasi dan kepuasan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja managerial.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Restu. 2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi*. Jurnal Ekonomi Volume 30, Nomor 3 September
- Afrida, Nur. 2007. *Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)*. Skripsi Universitas Negeri Padang
- Anjarwati, Mey. 2012. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Accounting Analysis Jurnal (1) (2) (2012)
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen* buku dua. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat.
- Annisa Pratiwi. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasara Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang*. Skripsi
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Astika, I. B. Putra. 2010. *Konsep-konsep Dasar Akuntansi Keuangan*. Denpasar: Udayana University Press
- Bahl, R. W. dan Linn, J.F. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press
- Bahl. 2002. *Mengevaluasi Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Yogyakarta: BPF

- Bird, Richard M., Vaillancourt, Francois., 2000, *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Budi Astuti. 2011. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Pimpinan Dalam Pelaksanaan Program di SKPD dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi". *Skripsi*. Universitas Negeri Padang
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Cetakan keempat. Gadjah Mada University Press
- Ebel. 2000, *The Economic of Fiscal Decentralization, World Bank (Makalah)*. Jakarta
- Garrison, Ray H. Dan Noreen, Eric. 2000. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta : Salemba Empat
- Gede Harry Marta. 2014 *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai variabel pemoderasi*. Jurnal Akuntansi S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2 No 1 tahun 2014
- Ghazali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP Semarang
- Gunawan R, Sudarmanto. 2005. *Analisis Regresi Linier dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Halim, Abdul. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat

- Indriantoro, Nur dan Supomo. B. 2002. *Methodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi I. Yogyakarta : BPFE
- Krismiaji. 2011. *Dasar-dasar Akuntansi manajemen*. Yogyakarta. UPP.amp.YKPN
- Luthans F. 1996. *Organization Behavior*, New York : Mc Graw Hill. International
- Mahsun, Mohamad, Firma. S dan Heribertus. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 1*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Nafarin. 2014. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi revisi. Jakarta : Salemba Empat
- Noerdiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat
- Nor, Wahyudin, 2007, *Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial, SNA X, Makassar*
- Pasalong, Harbani. 2012. *Methode Penelitian Administrasi Public*. Penerbit : Alfabeta. Bandung
- Prayitno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta. Mediacom
- Putra, Deki. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas dan kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pearangkat Daerah Kota Padang)*. Jurnal
- Samuel Abel TS. 2008. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Kawasan Industri*. Medan. Tesis

Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latian SPSS Statistik Multivariate*. Jakarta. PT Elex Media Computindo

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Suhartono, Ehrmann dan Mochamad Solikin. 2006. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Terhadap Kesenjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Proseeding Simposium Nasioanal Akuntansi IX. Padang 23-26 Agustus 2006

Sumarsono, Sonny. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Supranto, J. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Singarimbun M, dan Effendi G. 2010. *Metodologi Penelitian Survei*. Edisi 8. Jakarta. Pustaka LP3ES

Peraturan Perundang-Undangan

PP 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

UU No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah

Internet

<http://www.jembergo.com>

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

JUDUL

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)**

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan, dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk yang ada. Adapun kuesioner saya lakukan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Data-data yang diperoleh akan saya jaga kerahasiaannya serta dipergunakan hanya untuk kepentingan akademik. Jawaban dari Bapak/Ibu tidak ada yang salah dan benar dalam pengisian kuesioner ini. Saya mohon kesediaan saudara untuk menjawab semua pernyataan yang tersedia. Partisipasi saudara merupakan kunci keberhasilan penelitian saya, Atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Ponti Primastuti Aulia Nugraheni

Kuesioner

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Lama Bapak/Ibu menduduki jabatan ini :
6. Latar Belakang Pendidikan :

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (\checkmark) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu.

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

CS = Cukup Setuju

B. DAFTAR PERNYATAAN**1. AKUNTABILITAS PUBLIK**

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.					
2.	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik.					
3.	Program-program anggaran dirancang dengan pertimbangan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal.					
4.	Program-program anggaran dirancang dengan pertimbangan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik.					
5.	Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.					
6.	Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan.					
7.	Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku.					
8.	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas					

	hukum dan peraturan yang berlaku.					
9.	Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.					

2. KEJELASAN SASARAN ANGGARAN

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya memahami persis apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan saya.					
2.	Saya memahami bagaimana kinerja saya diukur.					
3.	Saya memiliki sasaran yang jelas yang membantu saya dalam melakukan pekerjaan.					
4.	Saya mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan.					
5.	Jika saya mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, saya mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting.					
6.	Sasaran dalam pekerjaan saya cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit).					
7.	Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran.					

3. DESENTRALISASI

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya berperan dalam pemberian wewenang dan penentuan jumlah anggaran.					
2.	Saya mempunyai wewenang dalam menentukan program kegiatan.					
3.	Saya berperan dalam penunjukan wewenang untuk menentukan keterlibatan pegawai.					
4.	Saya mempunyai wewenang dalam penentuan skala prioritas program.					
5.	Saya berperan dalam pemberian wewenang untuk menentukan penambahan dan mutasi pegawai.					

4. KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Perencanaan Saya berperan dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program.					
2.	Investigasi Saya berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya					

	berbentuk catatan dan laporan.					
3.	Pengkoordinasian Saya ikut berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan.					
4.	Evaluasi Saya berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit/sub unit saya.					
5.	Pengawasan Saya berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/ sub unit saya.					
6.	Pemilihan Staf Saya berperan dalam mengelola, mengatur dan memilih pegawai pada unit/ sub unit saya.					
7.	Negosiasi Saya berperan dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa yang dibutuhkan dengan pihak lain diluar organisasi.					
8.	Perwakilan Saya berperan dalam mewakili organisasi saya untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi.					
9.	Kinerja secara menyeluruh					

	Saya mengevaluasi kinerja dan sasaran kinerja secara menyeluruh.					
--	--	--	--	--	--	--



Lampiran 3

HASIL UJI VALIDITAS DATA**Factor Analysis****KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,682
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square	138,750
Sphericity Df	49
Sig.	,000

Component Matrix^a

	Component
	1
X1-1	,557
X1-2	,600
X1-3	,580
X1-4	,674
X1-5	,688
X1-6	,597
X1-7	,514
X1-8	,801
X1-9	,774

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
X1-1	,557
X1-2	,600
X1-3	,580
X1-4	,674
X1-5	,688
X1-6	,597
X1-7	,514
X1-8	,801
X1-9	,774

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components
extracted.

Factor Analysis**KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,602
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square	103,244
Sphericity Df	49
Sig.	,000

Component Matrix^a

	Component
	1
X2-1	,727
X2-2	,571
X2-3	,526
X2-4	,838
X2-5	,549
X2-6	,552

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components

extracted.

Factor Analysis**KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,678
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square	85,107
Sphericity Df	49
Sig.	,000

Component Matrix^a

	Component
	1
X3-1	,550
X3-2	,899
X3-3	,927
X3-4	,943
X3-5	,514
X3-6	,555
X3-7	,561

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components
extracted.

Factor Analysis**KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,655
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square	59,269
Sphericity Df	49
Sig.	,000

Communalities

	Initial	Extraction
Y-1	1,000	,004
Y -2	1,000	,103
Y -3	1,000	,684
Y -4	1,000	,768
Y -5	1,000	,776
Y -6	1,000	,768
Y -7	1,000	,776
Y -8	1,000	,768
Y -9	1,000	,562

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Lampiran 4

HASIL UJI RELIABILITAS DATA**Reliability****Scale: 0,60****Case Processing Summary**

	N	%
Cases Valid	49	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	49	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,818	9

Reliability**Scale: 0,60****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	49	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	49	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,713	5

Reliability**Scale: 0,60****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	49	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	49	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,692	7

Reliability**Scale: 0,60****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	49	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	49	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,724	9

Lampiran 5

HASIL UJI NORMALITAS DATA**NPar Tests**

		X1	X2	X3	Y
N		50	50	50	50
Normal	Mean	,0000000	,0000000	,0000000	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,00000000	1,0000000	1,00000000	1,0000000
			0		00
Most Extreme	Absolute	,128	,136	,171	,086
Differences	Positive	,080	,136	,171	,086
	Negative	-,128	-,085	-,080	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		1,034	1,095	1,375	,693
Asymp. Sig. (2-tailed)		,235	,181	,065	,723

Lampiran 6

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA**Regression****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Y	,0000000	1,0000000	50
X1	,0000000	1,0000000	50
X2	,0000000	1,0000000	50
X3	,0000000	1,0000000	50

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,726 ^a	,527	,512	,94230524	1,981

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11,612	5	2,322	2,615	,033 ^a
	Residual	52,388	21	,888		
	Total	64,000	24			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,226	,117		,000	1,000		
	X1	,206	,133	,206	2,551	,013	,782	1,278
	X2	,212	,137	,212	2,549	,013	,741	1,349
	X3	-,122	,144	-,122	,849	,399	,668	1,498

a. Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y

